**JURNAL ILMIAH**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PENATAAN RUANG BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



**Oleh:**

**HASIM**

**D1A008183**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2015**

**Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PENATAAN RUANG BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

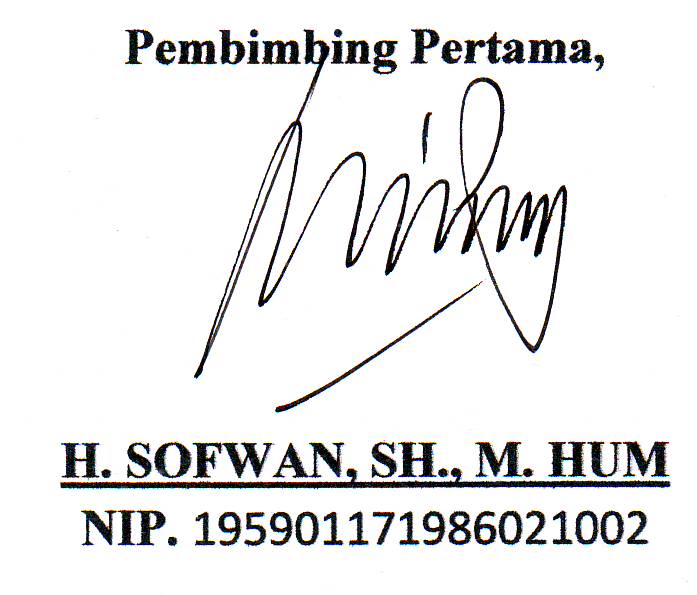


**Oleh:**

**HASIM**

**D1A 008183**

**Menyetujui,**

****

**Pembimbing Pertama,**

**H. SOFWAN, SH., M. HUM**

**NIP.** 195901171986021002

**PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PENATAAN RUANG BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**HASIM**

**D1A008183**

**Fakultas Hukum Universitas Mataram**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang di Kabupaten Lombok Timur, bagaimanakah pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam kebijakan tata ruang pemerintah daerah di Kabupaten Lombok Timur, dan apakah pemberian insentif dan disinsentif ini sudah memberikan perlindungan hak terhadap pihak yang berkepentingan. untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum dan pengetahuan bagi masyarakat maupun pemerintah terkait dengan topik ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber dan jenis bahan hukum/data yang digunakan adalah sumber kepustakaan dan sumber lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang di Kabupaten Lombok Timur tidak pernah terlaksana disebabkan karena ketiadaan Peraturan Bupati yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif tersebut.

**Kata Kunci: Insentif, Disinsentif**

**GRANTING OF incentives and disincentives in LIVING ARRANGEMENT UNDER PERDA NUMBER 2 YEAR 2012 IN EAST LOMBOK**

**Hasim**

**D1A008183**

**Faculty of Law, University of Mataram**

**ABSTRACT**

The purpose of this research is to know about the implementation of incentives and disincentives in the arrangement of space in East Lombok, how the implementation of incentives and disincentives in local government spatial policy in East Lombok, and whether incentives and disincentives have already provide protection of the rights of the parties concerned. to provide contributions to the development of legal science and knowledge for society and the government relating to this topic. This type of research is empirical normative legal research. The method used in this research is the approach of legislation, the conceptual approach and the sociological approach. The source and type of legal material / data used are the source of literature and source field. The results showed that the implementation of incentives and disincentives in the arrangement of space in East Lombok was never implemented due to the absence of the decree that regulates specifically on the implementation of the provision of incentives and disincentives.

Keywords: Incentives, Disincentives

1. **PENDAHULUAN**

Ruang merupakan sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam yang merupakan salah satu karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian ruang wilayah Indonesia merupakan suatu aset yang harus dimanfaatkan oleh bangsa dan masyarakat Indonesia secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti, ekonomi, sosial, budaya, hankam, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan nasional yang serasi dan seimbang”.[[1]](#footnote-1)

Kegiatan penataan ruang merupakan bagian dari perwujudan tugas dan peran pemerintah yang konstitusional dalam melaksanakan rencana penataan ruang untuk menghasilkan suatu perencanaan yang menjadi dasar dalam aktifitas-aktifitas pemanfaatan ruang. Demikian juga halnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam rencana tata ruang kedepan. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 menjelaskan; insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Insentif dan disinsentif merupakan Perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang diperlukan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ilmiah ini menyangkut Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Kebijakan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Apakah Pemberian Insentif dan Disinsentif Sudah Memberikan Perlindungan Hak Terhadap Pihak Yang Berkepentingan. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam kebijakan tata ruang oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur, 2) Untuk mengetahui pemberian insentif dan disinsentif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 sudah memberikan perlindungan hak terhadap pihak yang berkepentingan. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) pendekatan peraturan perundang-undangan, 2) pendekatan konseptual, dan 3) pendekatan sosiologis. Untuk sumber dan jenis bahan hukum/data yang digunakan adalah 1) sumber kepustakaan (data sekunder) dan 2) sumber lapangan (data primer). Sedangkan analisis bahan hukum/data menggunakan pengolahan data secara kualitatif.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Kebijakan Tata Ruang di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur**

Implementasi kebijakan terhadap suatu produk perundang-undangan tertentu, seakan-akan merupakan sesuatu yang dianggap sangat sederhana. Padahal, pada tingkat implementasi inilah suatu produk hukum dapat diaktualisasikan untuk tercapainya tujuan yang ingin dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Suatu kebijakan adalah tindakan yang diambil dengan penuh kearifan, serta diperlukan sikap konsisten, dan komitmen terhadap tujuan awal.[[2]](#footnote-2) Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur yang berwenang dalam pemberian insentif dan disinsentif terhadap penataan ruang di Lombok Timur seharusnya menindaklanjuti dengan tegas, supaya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang bisa berjalan sesuai dengan rencana tata ruang, karena bagaimanapun juga pemberian insentif dan disinsentif bisa dijadikan untuk merangsang atau memberikan dorongan terhadap masyarakat untuk taat aturan dalam usaha kedisiplinan pembangunan pemanfaatan penataan ruang.

Insentif dan disinsentif merupakan salah satu arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah pengendalian yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah Kabupaten. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berfungsi: a) sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, b) menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, c) menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang, d) meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan e) mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten disusun berdasarkan: a) rencana struktur ruang dan pola ruang, b) masalah, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten, c) kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan, d) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten disusun dengan kriteria: a) terukur, realistis, dan dapat diterapkan, b) penetapannya melalui kesepakatan antar pemangku kepentingan.

Arahan pemberian insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi, sedangkan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif bisa diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah, bisa juga dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, dan dari pemerintah daerah kepada masyarakat/swasta. Pemberian insentif dan disinsentif dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

Insentif dan disinsentif yang dijadikan sebagai salah satu alat pengendalian dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Timur tidak pernah terlaksana dengan baik dan efektif oleh pemerintah daerah. Seperti misalnya di Kelurahan Pancor dan Kelurahan Selong. Masyarakat Pancor, maupun masyarakat Selong yang menikmati pemanfaatan ruang mengatakan selama ini tidak pernah ada pemberian insentif maupun disinsentif sehingga wajar saja berdasarkan hasil pengamatan peneliti banyak pemanfaatan ruang di Kelurahan Pancor maupun di Kelurahan Selong yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

H. Kemalludin selaku Lurah di Kelurahan Pancor mengatakan: “saat ini banyak masyarakat Pancor yang melakukan pemanfaatan ruang, baik yang sesuia dengan rencana tata ruang maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Meskipun demikian insentif dan disinsentif yang dijadikan sebagai alat pengendalian dalam penataan ruang tidak pernah ada. Zainul Fuad selaku Lurah di Kelurahan Selong juga mengatakan: “ terkait dengan insentif dan disinsentif dalam penataan ruang selama ini tidak pernah ada, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur hanya melakukan sosialisasi saja mengenai penataan ruang.[[3]](#footnote-3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan sebagai acuan normatif dalam penataan ruang tidak berjalan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dalam pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya dalam pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif, ketentuan tersebut sudah diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur yaitu: (1). Ketentuan insentif dan disinsentif diselenggarakan untuk: a) Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang seuai dengan rencana tata ruang; b) Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan c) Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah tersebut, pemberian insentif dan disinsentif menghendaki supaya pelaksanaan pengendalian ruang bisa ditingkatkan dalam rangka mewujudkan tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Namun sebaliknya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Edi Syuria selaku Kabid Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lombok Timur mengatakan; “peningkatan upaya pengendalian dalam pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam mewujudkan tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, pola ruang, dan struktur ruang tidak terlaksana dengan maksimal begitu juga halnya dengan pemfasilitasian dan peningkatan kemitraan antara semua pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang, karena pemberian insentif dan pengenaan disinsentif yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten tidak pernah terlaksana.”[[4]](#footnote-4)

Disamping itu Wiwin Ayu Iswardianingrum selaku Kabid Hukum dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur mengatakan: “selama ini belum ada pengaturan lebih khusus atau tidak ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang bentuk dan tata cara dalam pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif tersebut, sehingga pemberian insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang tidak pernah dilaksanakan,[[5]](#footnote-5) karena berdasarkan Pasal 47 ayat (11) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur menyatakan “ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif non fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Suginto selaku Kabid Fisik dan Tata Ruang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur menyatakan: “implementasi dari insentif dan disinsentif dalam hal penataan ruang tidak pernah terlaksana. Karena dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur dikatakan bahwa pelaksanaan dari insentif dan disinsentif tersebut lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati, dan selama ini Peraturan Bupati itu belum ada.[[6]](#footnote-6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk bertindak dalam melakukan pengendalian penataan ruang, tidak pernah di tindaklanjuti, khususnya dalam pemberian insentif dan disinsentif di Kabupaten Lombok Timur, sehingga pengendalian dalam pemanfaatan penataan ruang tidak pernah terealisasi.

1. **Perlindungan Hak Penerima Dalam Pemberian Insentif dan Disinsentif di Kabupaten Lombok Timur**

Setiap orang berhak untuk mendapatkan haknya yang harus dilindungi oleh Undang-Undang, agar hak-hak orang bisa terjamin demi terwujudnya keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia menegaskan; “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.[[7]](#footnote-7)

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang. Begitu juga halnya yang dimiliki oleh masyarakar di Kabupaten Lombok Timur, mereka berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi hak-hak mereka, seperti halnya dalam pemberian insentif dan disinsentif atas dasar pemanfaatan penataan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Bupati selaku kepala daerah di Kabupaten Lombok Timur harus melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat Lombok Timur dalam hal pemberian hak dalam bentuk pemberian insentif dalam penataan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Sebagai salah satu contoh, Lalu Akup selaku perangkat Lurah bidang pemerintahan Kelurahan Pancor mengatakan, selama ini belum pernah ada pemberian insentif dalam penataan ruang di Kelurahan Pancor, meskipun banyak warga masyarakat Pancor yang melakukan pemanfaatan penataan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.[[8]](#footnote-8)

H. Sri Gedap salah satu warga Kelurahan Pancor pemilik toko elektronik di pinggir jalan raya Pancor juga mengatakan: “tidak ada insentif yang pernah diberikan kepada saya meskipun bangunan ini sesuai dengan aturan yang ada.[[9]](#footnote-9) Disamping itu juga, bukan hanya di Kelurahan Pancor saja, melainkan di Kelurahan Selong juga demikian. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Zainul Fuad selaku Lurah di Kelurahan Selong mengatakan: “selama ini terkait dengan penataan ruang belum pernah ada perlindungan hak dalam bentuk insentif maupun disinsentif oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat di Kelurahan Selong ini, meskipun ada masyarakat yang melakukan pemanfaatan penataan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, ataupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.[[10]](#footnote-10) Dewi sartika selaku pemilik bangunan di pinggir jalan raya Kelurahan Selong mengatakan: “kami tidak pernah tau masalah insentif dan disinsentif dalam hal penataan ruang, karena selama ini belum pernah ada teguran ataupun semacam pemberian sesuatu terhadap kita yang melakukan pemanfaatan ruang yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata rung.[[11]](#footnote-11)

Edi Syuria selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur mengatakan; “sebenarnya masyarakat berhak untuk meminta insentif, ketika masyarakat itu melakukan pemanfaatan penataan ruang sesuai dengan rencana ruang, tetapi selama ini belum pernah ada masyarakat baik masyarakat Kelurahan Pancor maupun masyarakat di Kelurahan Selong yang meminta untuk pemberian insentif. Meskipun demikian seandainya ada masyarakat, baik masyarakat di Kelurahan Pancor maupun masyarakat diluar Kelurahan Pancor yang meminta untuk pemberian insentif, kami Dinas Pekerjaan Umum tidak akan bisa untuk melakukan pemberian insentif, karena tidak ada Peraturan Bupati yang mengaturnya yang dijadikan sebagai acuan dalam pemberian insentif.[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, peneliti menegaskan bahwa dengan ketiadaan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai insentif dan disinsetif ini, maka masyarakat Kelurahan Pancor maupun masyarakat Kelurahan Selong tidak pernah ada yang diberikan hak-haknya oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur yakni dalam hal pemberian insentif maupun disinsentif, meskipun dalam pemanfaatan penataan ruang ada yang sesuai dengan rencana tata ruang, dan ada yang melakukan pemanfaatan penataan ruang yang tidak sesuai dengsn rencana tata ruang. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur atau pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif ini juga tidak bisa memberikan hak-hak masyarakat disebabkan karena belum ada peraturan atau undang-undang yang mengaturnya.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan jurnal diatas maka penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pemberian Insentif dan disinsentif yang dijadikan sebagai suatu upaya dalam pengendalian pemanfaatan penataan ruang di Kabupaten Lombok Timur tidak pernah terlaksana. Kewenangan pemerintah daerah atau pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan disinsentif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan sebagai dasar hukum tidak pernah di tindak lanjuti, buktinya tidak ada Peraturan Bupati yang mengatur lebih khusus mengenai pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang. (2) Perlindungan hak terhadap pihak yang berkepentingan dalam hal pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan rung di Kabupaten Lombok Timur sampai saat ini tidak pernah ada. Masyarakat yang menikmati pemanfaatan ruang ada yang menikmati ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, ada juga yang menikmati ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. meskipun demikian, pemerintah ataupun pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan disinsentif ini tidak pernah ada kebijakan berupa Peraturan Bupati yang dikeluarkan terkait dengan perlindungan hak penerima dalam pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang di Kabupaten Lombok Timur.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penyusun mengemukakan saran sebagai berikut: (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang di Kabupaten Lombok Timur perlu adanya Peraturan Bupati yang menindak lanjuti dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur tersebut, agar apa yang di harapkan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 bisa terlaksana. (2) Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur harus benar-benar berkomitmen membuat kebijakan-kebijakan dalam penataan ruang, agar perlindungan hak dalam pemberian insentif dan disinsentif tehadap pihak yang berhak mendapatkannya bisa dilaksanakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Soemantri, Sri, 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni.

D.A. Tisnamidjaja, 1997, *Pranata Pembangunan*, Bandung, Universitas Parahyangan

Asep Warlan Yusuf, 1990, *Pranata Pembangunan,* Pro Justitia.

Budiharjo, Eko,1997, *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*, Yogyakarta: Andy

-----, *Tata Ruang Perkotaan*, Alumni, Bandung, 1997.

Hermit, Herman, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang (Nomor 26 Tahun 2007),* Bandung: Mandar Maju.

Juniarso Ridwan, dan Sodik Achmad, 2013, Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Otonomi Daerah, Bandung, cet, III, Nuansa

Mochtar Kusumahatmaja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni.

-----1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam pembangunan,* Bina Cipta, Bandung.

M. Hadjon, Pilippus, 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.* Yogyakarta: Gajah Mada Unifersiti, Press.

Kansil, CST, 1985. *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, Jakarta, Aksara Baru.

Sudirwo, Daeng, 1989. Pokok*-pokok Pemerintahan di Daerah dan* *Pemerintahan Desa*, Bandung, Angkasa.

1. **Peraturan-Peraturan**

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Lombok Timur

1. Ridwan Juniarso dan Ahmad Sodik, *HUkum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, cet, III, Nuansa, Bandung, 2013, hlm. 23 [↑](#footnote-ref-1)
2. H. Siswanto Sunarno*, op. Cit.,* hlm. 82 [↑](#footnote-ref-2)
3. Wawancara dengan Zainul Fuad, Lurah Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Tanggal 1-12-2014. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wawancara dengan Edi Syuria, Kabid Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur. Tanggal 26-11-2014 [↑](#footnote-ref-4)
5. Wawancara dengan Wiwin Ayu Iswardianingrum, Kabid Hukum dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 24-11-2014. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wawancara dengan Suginto, Kabid Fisik dan Tata Ruang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Tanggal-24-11-2014. [↑](#footnote-ref-6)
7. Indonesia, Undang-Undang Dasar RI 1945, Pasal. 28h [↑](#footnote-ref-7)
8. Wawancara dengan Lalu Akup, Perangkat Lurah, Kelurahan Pancor, Kabupaten Lombok Timur. Tanggal 1-12-2014. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wawancara dengan H. Sri Gedap, Pemilik Bangunan, Kelurahan Pancor, Kabupaten Lombok Timur. Tanggal 1-12-2014. [↑](#footnote-ref-9)
10. Wawancara dengan Zainul Fuad, Lurah Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Tanggal 14-01-2015. [↑](#footnote-ref-10)
11. Wawancara dengan Dewi Sartika, Pemilik Bangunan, Kelurahan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Tanggal 14-01-2015 [↑](#footnote-ref-11)
12. Wawancara dengan Edi Syuria, Kabid Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Lombok Timur. Tanggal 1-12-2014. [↑](#footnote-ref-12)